

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TRANSFORMASI STRUKTURAL DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2000 - 2010

Anita Roosmawarni

Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Soekarnoto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

ABSTRAK

Dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada karakteristik daerah (endogenous development), dengan memanfaatkan potensi-potensi sumberdaya lokal. Identifikasi sektor ekonomi yang potensial (basis) menjadi kebutuhan bagi optimalisasi proses dan keberhasilan pembangunan ekonomi, dimana proses transformasi struktural sedang terjadi di dalamnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan untuk mengetahui struktur pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota baik secara sektoral maupun secara agregat terhadap Provinsi Jawa Timur. Terjadinya transformasi struktural sedikit banyak akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Location Quotient (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), analisis overlay, dan analisis Shift Share.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sektor jasa merupakan sektor yang menjadi basis di hampir 30 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor bangunan cenderung mengalami perlambatan sebaliknya semua sektor tersier yang meliputi : sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan sektor jasa cenderung mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi yang terjadi di 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis shift share menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Timur sedang terjadi transformasi struktural yang ditandai dengan menurunnya peranan sektor pertanian, dan semakin meningkatnya peranan sektor jasa. Kondisi ini sekaligus bertentangan dengan teori Kuznets yang menyatakan bahwa proses transformasi struktural ditandai dengan bergesernya peranan sektor pertanian ke sektor industri manufaktur, dan selanjutnya ke sektor jasa.

Kata kunci : LQ, MRP, dan transformasi struktural

ABSTRACT

Within the framework of regional economic development goals needed policy development based on regional characteristics (endogenous development), by exploiting the potential of local resources. Identification of potential economic sectors (base) is needed for the optimization process and the success of economic development, where the process of structural transformation is happening in it. The purpose of this study is to analyze the economic sectors which are the basis in each district/city in East Java province and to determine the structure of economic growth in the county/city both sectoral and aggregate the province of East Java. Structural transformation to some extent will have an impact on overall economic growth. Analysis tools used in this study is Location Quotient (LQ), Growth Ratio Model (MRP), overlay analysis, and shift share analysis. Results of this study showed that the service sector is a sector which is the basis in nearly 30 districts/cities in East Java Province. Growth in agriculture, processing industries, and the construction sector likely slowed otherwise all tertiary sectors which include: trade, hotels, and restaurants; transport and communication, finance, leasing, and services company, and the services sector is likely to experience growth positive. Trade, hotels and restaurants is a sector with the highest growth occurring in 33 districts/cities in East Java Province.

Shift share analysis results showed that in the province of East Java is going structural transformation characterized by decreasing the role of the agricultural sector, and the increasing role of the service sector. This condition as well as contrary to the Kuznets theory which states that the process of structural transformation contribution marked by shifting agriculture to manufacturing and then to services sector.

Keywords : *LQ, MRP, and structural transformation*



I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hampir setiap negara berkembang telah menjadikan pembangunan sebagai sebuah komitmen bangsa untuk mengejar ketertinggalannya dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah pembangunan ekonomi yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional suatu negara (Sarwedi, 2010:1). Pada awal pembangunan ekonomi suatu negara, umumnya perencanaan pembangunan lebih berorientasi pada strategi pertumbuhan ekonomi (*growth oriented strategy*) dan diyakini bahwa kesejahteraan masyarakat terjadi bersamaan dengan pertumbuhan GNP per kapita yang cepat, yang diharapkan akan terjadi penyesuaian ke bawah (*trickle down effect*) kepada masyarakat luas dalam bentuk lapangan pekerjaan maupun kesempatan ekonomi yang lainnya, Budiharsono (1996:5).

Asumsi penekanan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi ternyata tidak memberi dampak yang besar terhadap perkembangan ekonomi di semua negara. Pengalaman pada tahun 1950-an, banyak negara-negara berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan dan pergeseran struktur ekonomi/transformasi struktural (Chenery dan Srinivasan, 1988:11).

Studi empiris Chenery menyimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang dapat diamati dimana cirinya hampir sama untuk semua negara. Pergeseran struktur ekonomi dalam proses pembangunan suatu negara dapat dibedakan berdasarkan pada persentase tenaga kerja yang berada di sektor primer, sekunder dan tersier (Syrquin, 1988:212). Taylor dan Chenery, mengkaji pola perubahan struktural selama periode 1950-1963 dengan *cross section*, dan membuah hasil bahwasanya besar kecilnya negara serta kebijakan perdagangan yang dianut memberikan pengaruh yang nyata terhadap cepat atau lambatnya proses perubahan struktural yang terjadi. Pola pertumbuhan negara besar menunjukkan bahwa pangsa sektor industri dalam PDB meningkat cepat, dan sebaliknya pangsa sektor primer dalam PDB secara terus menerus mengalami penurunan. Lebih lanjut, peneliti membagi struktur produksi ke dalam

sektor primer (pertanian dan pertambangan), sektor industri (industri pengolahan dan bangunan) dan sektor jasa (Dasril, 1993:16).

Kajian empiris Syrquin dan Chenery terhadap 101 negara selama kurun waktu 1950-1970, berhasil mengidentifikasi 21 indikator perubahan struktural melalui tiga proses yang mengikuti pertumbuhan, yaitu proses akumulasi, proses alokasi, proses demografis, dan distribusi. Berbeda dengan studi sebelumnya, Syrquin dan Chenery membagi struktur produksi ke dalam empat sektor, terdiri dari sektor primer (pertanian dan pertambangan), sektor industri (pengolahan dan bangunan), sektor utility/pelayanan umum (listrik, gas, air minum, pengangkutan dan komunikasi), dan sektor jasa (Budiharsono, 1996:39).

Kuznets (1971), menyatakan bahwa proses transformasi struktural negara maju cenderung seragam antara satu negara dengan yang lain. Komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pertanian akan menurun, hasil dari sektor industri pada awalnya akan naik tetapi kemudian turun, dan hasil dari sektor jasa akan selalu meningkat. Negara-negara maju mengalami proses pertumbuhan yang panjang dalam perekonomiannya terutama terkait dengan pertumbuhan PDBnya.

Studi empiris El-Hadj, dengan sampel 38 negara berkembang di Sub-Saharan Afrika, Asia Timur dan Tenggara serta Amerika Latin, menghasilkan simpulan bahwasanya semua negara mengawali pertumbuhan ekonominya dengan suatu proses yang disebut dengan transformasi struktural, akan tetapi pola transformasi struktural yang terjadi tidak sama antara satu negara dengan negara yang lain. Hasil penelitian menegaskan bahwa teori Kuznets tidak berlaku di negara-negara berkembang.

Transformasi struktural merupakan gejala alamiah yang harus dialami oleh perekonomian yang sedang tumbuh, dan kebijaksanaan rekayasa transformasi struktur harus ditujukan untuk memaksimalkan dampak positif dari transformasi. Hill (1996) menguraikan transformasi struktural pada periode 1966-1992 dengan obyek penelitian perekonomian Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi struktural yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu tersebut dinilai sangat terlalu cepat. Hal ini ditandai dengan sumbangan sektor pertanian terhadap GDP telah menyusut hingga kurang dari setengahnya sejak tahun 1966, dan pada tahun 1992 sumbangannya hanya tinggal 36% (Amir dan Nazara, 2005:5).

Pembangunan ekonomi di daerah adalah sebuah proses yang selayaknya dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sumber daya dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta guna menciptakan lapangan kerja baru yang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Potensi sumber daya alam yang banyak tersedia di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu modal dalam mening-katkan perekonomian daerah. Dilihat dari kondisi alam, sektor pertanian masih menjadi gantungan hidup masyarakat di Provinsi Jawa Timur, meskipun peranannya berangsur-angsur tergeser oleh sektor industri pengolahan. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dapat diamati dari beberapa indikator yang lazim digunakan, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian dan ukuran kemajuan suatu daerah, di samping tetap memperhatikan tingkat pertumbuhan, pendapatan per kapita, dan pergeseran struktur ekonomi.

Akan tetapi pembangunan daerah seringkali dihadapkan pada suatu permasalahan yang timbul pada

penetapan skala prioritas kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*). Seiring dengan otonomi daerah, maka kewenangan yang dimiliki daerah dalam mengelola segala bentuk sumber daya dan pembiayaan, diharapkan akan mampu memberi dampak yang positif bagi kemajuan perekonomian daerah serta tercipta peningkatan pembangunan daerah secara optimal. Pembangunan daerah akan memanfaatkan aspek-aspek yang secara ekonomi berpotensi dikembangkan dalam rangka mengembangkan kemandirian kabupaten/kota.

Rumusan Masalah

1. Sektor-sektor ekonomi apa sajakah yang menjadi basis untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimanakah pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimanakah proses transformasi struktural yang terjadi di Provinsi Jawa Timur?



makanan, minuman dan tembakau sangat dominan dari sisi besaran outputnya, juga memiliki angka pengganda yang cukup tinggi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang identifikasi terhadap sektor ekonomi yang potensial dan transformasi struktural pernah dilakukan beberapa peneliti dengan menggunakan berbagai pendekatan alat analisis yang berbeda-beda yaitu :

1. Anwar, dkk (1995) melakukan penelitian selama 1969-1991 tentang prospek ekonomi Indonesia dalam jangka pendek. Kesimpulan yang ada yaitu bahwa terdapat kecenderungan bahwa (1) sektor pertanian cenderung terlalu cepat menurun pangsaanya terhadap PDB, (2) pangsa sektor industri manufaktur cenedrung masih lebih rendah dari pola normalnya, (3) pangsa sektor jasa cenderung lebih besar dari pola normalnya, disebabkan menonjolnya sektor informal dalam pembentukan nilai tambah bruto perdagangan.
2. Hidayat Amir dan Suahasil Nazara (2005), melakukan studi tentang transformasi struktural dan identifikasi terhadap sektor-sektor unggulan di Jawa Timur pada tahun 1994-2000. Dengan memanfaatkan analisis *Input-Output*, kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah telah terjadi pergeseran dalam beberapa sektor unggulan dan angka pengganda sektoral. Peranan sektor industri lainnya dan sektor industri
3. Haynes dan Dinc (1997), melakukan penelitian di Amerika Serikat periode 1960-1990 untuk mengetahui perekonomian dan perubahan pekerjaan pada dua belas negara bagian yang terdiri dari enam negara bagian di kawasan matahari (Arizona, California, Florida, Kentucky, Tennessee dan Texas) dan enam negara bagian di kawasan salju (Illinois, Massachuszet, Michigan, New York, Ohio dan Pennsylvania) dengan menggunakan alat analisis *shift-share*.
4. Budiharsono (1996), penelitian tentang proses transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama kurun waktu 1969-1987. Hasilnya adalah bahwa proses transformasi struktural antar daerah selama kurun waktu penelitian, terjadi penyimpangan apabila dibandingkan dengan pola normal Chenery-Syrquin. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwasanya secara relatif, provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) pertumbuhan ekonominya (PDRB) lebih cepat jika dibandingkan dengan provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pertumbuhan ekonomi yang mantap di KBI disebabkan karena kualitas sumber daya manusia yang relatif baik, struktur industri (manufaktur)

dan pertanian, khususnya perkebunan besar yang relatif sudah maju.

Landasan Teori

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999:2). Kuznet dalam Todaro (2000:144), enam karakteristik proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara maju, yaitu :

1. tingkat pertumbuhan *output* per kapita dan pertumbuhan penduduk tinggi,
2. tingkat kenaikan produktivitas faktor total tinggi,
3. tingkat transformasi ekonomi yang tinggi,
4. tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi,
5. kecenderungan negara mulai menambah bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku, dan
6. terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Djojohadikusumo (1994:28) berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kuznet dalam Jhingan (2003:57), pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang ekonomi kepada penduduknya, sesuai dengan kemajuan teknologi, kelembagaan dan ideologis. Hakikat pembangunan ekonomi regional adalah pelaksanaan dari pembangunan ekonomi nasional pada wilayah tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan fisik, sosial ekonomi regional tersebut, serta harus didasarkan pada peraturan yang berlaku. Glasson (1977) dalam Suparta (2009:32), pembangunan ekonomi daerah (*region*), erat kaitannya dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah serta adanya keterkaitan (*linkage*) kegiatan ekonomi antar daerah sekitarnya. Potensi ekonomi maupun karakteristik yang dimiliki suatu daerah akan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain.

Teori pembangunan *W. Arthur Lewis* pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara desa dan kota, dengan mengikutsertakan proses

urbanisasi yang terjadi antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi (Kuncoro, 1997:51).

Teori Chenery dikenal dengan *teori pattern of development*, yang fokus terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur perkonomian negara berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai roda penggerak ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri (Kuncoro, 1997:58).

Abipraja (1993:35), bahwa perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan bukan hanya perubahan struktur ekonomi saja yang mengalami perubahan, akan tetapi struktur sosial yang berubah dalam proses pembangunan adalah struktur masyarakat pedesaan berubah ke arah masyarakat perkotaan dan industri. Perubahan struktur bagi tiap negara/bangsa sangatlah berbeda, tergantung kepada tersedia/tidaknya sumber alam, arah perkembangan demokratis, sejarah sosio-politik, dan kebijaksanaan yang dianut. Kebijakan itu adalah yang menurut Abipraja merupakan penentu arah perkembangan dan perubahan struktural.

Zadjuli (1985) dalam Sufri (2003:56), perubahan struktur ekonomi dapat dilihat dari komposisi *output* ataupun distribusi dari kegiatan ekonomi secara sektoral. Berkaitan dengan itu diungkapkan secara substansi perubahan struktur ekonomi tersebut. Secara sektoral, struktur ekonomi dapat dilihat menurut tiga dimensi pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan menurut asal (*source of income*)
2. Pendekatan menurut penggunaan dari pendapatan (*disposable income*)
3. Pendekatan berdasarkan dua sistem (*dual economic system*)



- Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi/RPR (Provinsi Jawa Timur)

$$RP_r = \frac{\Delta X_{ir} / \Delta RV_{ir(t)}}{\Delta E_R / E_{R(t)}}$$

- Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi/RPS (kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur)

$$Rp_s = \frac{\Delta E_{ij} / \Delta E_{iR(t)}}{\Delta E_R / E_{R(t)}}$$

E_{ij} = Perubahan nilai output sektor i di wilayah studi (kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur) pada periode waktu t dan t + n

n = Jumlah tahun antara dua periode

E_{ir} = Perubahan nilai output sektor i di wilayah referensi.(Provinsi Jawa Timur)

E_{ir} = Nilai output sektor i di wilayah referensi. (Provinsi Jawa Timur)

E_R = Perubahan PDRB di wilayah referensi. (Provinsi Jawa Timur)

E_R = PDRB di wilayah referensi. (Provinsi Jawa Timur)

E_{ij} = Nilai output sektor i di wilayah studi (kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur).



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Location Quotient (LQ)

Tabel 1.

No.	Kab. / Kota	Rata-rata LQ Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	Kab. Pacitan	2,34	2,98	0,13	0,54	2,17	0,40	0,90	1,74	1,86
02.	Kab. Ponorogo	1,75	1,73	0,26	0,91	1,61	0,97	0,88	1,22	1,51
03.	Kab. Trenggalek	2,01	1,32	0,27	0,30	0,88	0,81	0,73	0,87	2,32
04.	Kab. Tulungagung	1,06	1,31	0,61	0,75	0,53	1,12	0,83	2,28	1,37
05.	Kab. Blitar	2,78	1,57	0,12	0,38	0,51	0,90	0,41	1,07	1,14
06.	Kab. Kediri	1,88	1,55	0,73	0,29	0,28	0,90	0,42	0,73	1,29
07.	Kab. Malang	1,68	1,53	0,64	0,85	0,42	0,90	0,66	0,78	1,66
08.	Kab. Lumajang	1,90	1,65	0,54	0,50	1,06	0,84	0,85	1,11	1,22
09.	Kab. Jember	2,34	2,50	0,33	0,58	0,71	0,76	0,81	1,17	1,12
10.	Kab. Banyuwangi	2,64	2,89	0,24	0,39	0,15	0,85	0,75	1,26	0,64
11.	Kab. Bondowoso	2,62	0,30	0,48	0,39	0,58	0,72	0,42	1,23	1,15
12.	Kab. Situbondo	1,76	1,28	0,38	0,63	0,79	1,26	0,77	0,75	0,98
13.	Kab. Probolinggo	2,03	1,32	0,61	0,78	1,19	0,77	0,82	0,82	1,03
14.	Kab. Pasuruan	1,40	0,49	1,14	1,37	0,67	0,79	0,50	0,76	1,15
15.	Kab. Sidoarjo	0,22	0,49	1,94	0,99	0,45	0,82	1,52	0,27	0,48
16.	Kab. Mojokerto	1,23	0,88	1,38	0,65	0,48	0,81	0,65	0,54	0,79
17.	Kab. Jombang	1,80	1,28	0,40	0,95	0,62	1,15	0,76	0,76	1,23
18.	Kab. Nganjuk	1,91	0,96	0,34	0,30	0,45	1,24	0,39	0,78	1,45
19.	Kab. Madiun	2,00	1,10	0,12	0,61	1,66	1,03	0,53	0,80	1,95
20.	Kab. Magetan	1,97	0,36	0,29	0,63	1,69	0,91	0,38	0,85	2,08
21.	Kab. Ngawi	2,06	0,36	0,23	0,39	1,22	1,05	0,55	1,14	1,60
22.	Kab. Bojonegoro	1,91	3,94	0,27	0,58	0,99	0,81	0,79	1,08	1,62
23.	Kab. Tuban	1,59	6,81	0,73	2,02	1,24	0,62	0,47	0,78	0,78
24.	Kab. Lamongan	2,72	0,11	0,18	0,94	0,82	0,99	0,32	0,69	1,22
25.	Kab. Gresik	0,58	1,16	1,78	2,41	0,99	0,77	0,47	0,75	0,37
26.	Kab. Bangkalan	2,02	0,83	0,16	0,52	1,49	0,96	1,10	0,95	1,65
27.	Kab. Sampang	2,74	5,18	0,03	0,43	0,75	0,72	0,42	0,73	1,25
28.	Kab. Pamekasan	2,99	0,74	0,07	0,75	1,22	0,46	0,74	1,27	1,78
29.	Kab. Sumenep	3,08	3,49	0,09	0,07	0,51	0,64	0,55	0,87	1,07
30.	Kota Kediri	0,01	0,00	2,69	0,16	0,05	0,72	0,18	0,68	0,13
31.	Kota Blitar	0,47	0,03	0,39	1,67	1,31	0,91	2,61	2,40	2,28
32.	Kota Malang	0,03	0,04	1,19	0,60	0,62	1,36	0,83	1,57	1,46
33.	Kota Probolinggo	0,53	0,01	0,55	1,28	0,15	1,44	2,41	1,43	1,16
34.	Kota Pasuruan	0,27	0,10	0,56	1,77	1,97	1,34	2,11	1,57	1,35
35.	Kota Mojokerto	0,13	0,00	0,54	2,33	1,01	1,37	2,58	1,48	1,58
36.	Kota Madiun	0,13	0,02	0,68	1,14	2,63	1,07	1,88	1,92	1,87
37.	Kota Surabaya	0,01	0,01	1,02	1,58	1,96	1,32	1,74	1,26	0,93
38.	Kota Batu	1,11	0,13	0,28	0,99	0,36	1,76	0,61	0,85	1,41

Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Tabel. 2

		Nilai RPR Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rata-rata		0,4747	1,1425	0,6581	1,3692	0,5418	1,5346	1,7027	1,2170	1,0615
Notasi		-	+	-	+	-	+	+	+	+

		Nilai RPS Per Sektor								
No.	Kab. / Kota	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	Kab. Pacitan	1,34 +	-1,16 -	1,30 +	7,67 +	-4,27 -	3,85 +	2,15 +	-4,54 -	3,24 +
02.	Kab. Ponorogo	-0,80 -	1,27 +	3,88 +	0,72 -	4,48 +	1,35 +	1,34 +	-0,67 -	0,52 -
03.	Kab. Trenggalek	0,90 -	1,89 +	0,70 -	2,09 +	0,72 -	1,83 +	0,41 -	0,88 -	0,59 -
04.	Kab. Tulungagung	0,95 -	0,73 -	1,21 +	3,02 +	1,40 +	0,75 -	4,00 +	1,31 +	0,24 -
05.	Kab. Blitar	0,69 -	0,36 -	0,09 -	5,63 +	-0,54 -	2,07 +	-0,53 -	0,57 -	0,91 -
06.	Kab. Kediri	0,36 -	1,12 +	1,38 +	1,38 +	0,43 -	1,61 +	0,82 -	0,76 -	1,29 +
07.	Kab. Malang	0,38 -	2,06 +	1,31 +	-0,56 -	2,03 +	1,42 +	0,29 -	1,94 +	1,06 +
08.	Kab. Lumajang	0,92 -	-0,47 -	0,55 -	-0,08 -	-0,05 -	1,18 +	1,00 +	0,85 -	3,15 +
09.	Kab. Jember	0,41 -	0,87 -	2,11 +	1,32 +	0,22 -	1,79 +	1,58 +	1,11 +	1,07 +
10.	Kab. Banyuwangi	1,18 +	0,26 -	-0,64 -	2,01 +	-9,98 -	1,55 +	0,93 -	0,79 -	0,54 -
11.	Kab. Bondowoso	0,68 -	1,96 +	1,89 +	2,04 +	0,38 -	1,59 +	1,09 -	0,96 -	0,79 -
12.	Kab. Situbondo	1,22 +	1,02 +	-0,59 -	1,41 +	-1,53 -	1,65 +	0,73 -	-0,64 -	0,98 -
13.	Kab. Probolinggo	0,21 -	-1,21 -	3,41 +	-0,66 -	-2,48 -	1,45 +	6,18 +	2,25 +	0,11 -
14.	Kab. Pasuruan	-0,02 -	94,37 +	1,38 +	1,83 +	2,95 +	1,09 +	2,15 +	1,88 +	0,83 -
15.	Kab. Sidoarjo	-0,86 -	-7,36 -	0,69 -	1,49 +	-1,19 -	2,37 +	2,69 +	1,07 +	1,12 +
16.	Kab. Mojokerto	0,70 -	1,65 +	0,89 -	1,24 +	0,67 -	1,52 +	1,33 +	0,96 -	0,82 -
17.	Kab. Jombang	0,74 -	1,47 +	0,86 -	0,26 -	-2,09 -	2,25 +	-1,23 -	0,02 -	0,37 -
18.	Kab. Nganjuk	0,58 -	0,80 -	1,03 +	2,48 +	-0,39 -	1,21 +	1,09 -	1,10 +	2,17 +
19.	Kab. Madiun	0,47 -	0,67 -	1,68 +	2,33 +	0,12 -	2,16 +	1,51 +	0,65 -	0,51 -
20.	Kab. Magetan	0,87 -	0,07 -	0,07 -	2,56 +	-2,08 -	1,98 +	0,09 -	-0,19 -	1,51 +
21.	Kab. Ngawi	0,66 -	0,63 -	0,18 -	2,85 +	-1,19 -	2,02 +	2,47 +	-0,84 -	1,18 +
22.	Kab. Bojonegoro	0,42 -	3,95 +	0,00 -	1,53 +	0,36 -	1,59 +	0,83 -	0,48 -	1,02 +
23.	Kab. Tuban	0,17 -	-0,81 -	2,22 +	3,68 +	1,14 +	2,19 +	1,42 +	1,83 +	0,90 -
24.	Kab. Lamongan	0,63 -	2,57 +	0,89 -	0,75 -	0,89 -	1,77 +	1,43 +	1,82 +	0,65 -
25.	Kab. Gresik	0,20 -	1,57 +	1,21 +	0,26 -	-0,81 -	1,16 +	1,66 +	1,17 +	4,50 +
26.	Kab. Bangkalan	-1,21 -	4,32 +	2,12 +	1,10 +	11,11 +	0,61 -	1,39 +	3,91 +	1,84 +
27.	Kab. Sampang	0,43 -	1,29 +	0,96 -	3,46 +	0,15 -	2,39 +	1,25 +	1,45 +	0,80 -
28.	Kab. Pamekasan	-0,06 -	3,52 +	8,68 +	3,73 +	1,77 +	2,58 +	1,89 +	2,37 +	1,75 +
29.	Kab. Sumenep	1,92 +	-5,59 -	0,01 -	-0,11 -	1,13 +	2,17 +	0,10 -	1,39 +	1,74 +
30.	Kota Kediri	-0,73 -	-0,91 -	1,44 +	0,21 -	2,45 +	-0,63 -	3,52 +	3,26 +	2,38 +
31.	Kota Blitar	0,46 -	-0,53 -	1,27 +	1,44 +	1,32 +	1,51 +	0,21 -	1,16 +	0,99 -
32.	Kota Malang	-0,19 -	0,33 -	0,62 -	4,23 +	1,12 +	1,28 +	0,38 -	1,14 +	1,36 +
33.	Kota Probolinggo	0,81 -	-2,28 -	-1,13 -	-0,02 -	7,79 +	1,77 +	0,86 -	1,46 +	2,69 +
34.	Kota Pasuruan	0,22 -	0,41 -	0,83 -	1,24 +	1,10 +	0,94 -	1,42 +	1,39 +	1,03 +
35.	Kota Mojokerto	18,85 +	0,00 -	0,44 -	1,12 +	-3,12 -	0,41 -	1,15 +	1,47 +	4,09 +
36.	Kota Madiun	0,24 -	0,69 -	0,65 -	1,51 +	0,32 -	1,69 +	1,65 +	1,04 +	0,68 -
37.	Kota Surabaya	-0,18 -	-0,12 -	0,28 -	1,41 +	0,65 -	1,43 +	1,69 +	1,04 +	1,11 -
38.	Kota Batu	0,65 -	1,68 +	0,49 -	1,52 +	1,96 +	1,00 +	1,88 +	1,51 +	1,39 +

Keterangan

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Sektor Pertanian | 6. Sektor Perdagangan, Hotel, & Restoran |
| 2. Sektor Pertambangan & Pengalihan | 7. Sektor Pengangkutan & Komunikasi |
| 3. Sektor Industri Pengolahan | 8. Sektor Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan |
| 4. Sektor Listrik, Gas, & Air Bersih | 9. Sektor Jasa-Jasa |
| 5. Sektor Bangunan | |

Shift Share Analysis (SSA)

Tabel 3

No.	Kabupaten/Kota	Indikator	S e k t o r								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kab. Pacitan	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	-	+	-	+	+	+
		DS	-	-	-	+	+	-	-	-	-
		PS + DS	-	-	-	+	+	+	-	+	-
2.	Kab. Ponorogo	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	-	-	+	+	+	+
		DS	+	-	-	+	-	-	-	+	-
		PS + DS	-	-	-	+	-	-	+	+	-
3.	Kab. Trenggalek	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	+	+	-	+	-	+	-	-	-
		PS + DS	+	+	-	-	-	+	-	+	-
4.	Kab. Tulungagung	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	-	+	+	-	-	+	-	-
		PS + DS	-	-	-	+	-	+	+	+	-
5.	Kab. Blitar	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	-	+	-	+	-	-	-	-
		PS + DS	-	+	+	-	+	+	+	+	-
6.	Kab. Kediri	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	-	+	+	+	-	-	+	-
		PS + DS	-	+	+	+	-	+	-	-	-
7.	Kab. Malang	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	+	+	-	+	-	-	+	-
		PS + DS	-	+	+	-	+	+	-	+	-
8.	Kab. Lumajang	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	+	-	+	-	-	+	+	-	+
		PS + DS	-	-	-	-	-	+	+	-	+
9.	Kab. Jember	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	-	+	+	-	+	-	-	-
		PS + DS	-	-	+	+	-	+	+	-	-
10.	Kab. Banyuwangi	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	+	+	+	-	+	-	-	-	-
		PS + DS	-	+	+	-	+	+	-	+	-
11.	Kab. Bondowoso	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	+	+	+	+	-	+	-	-	-
		PS + DS	-	+	+	+	-	+	+	-	-
12.	Kab. Situbondo	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	+	+	+	-	+	-	-	-	-
		PS + DS	-	+	+	+	-	-	-	-	-
13.	Kab. Probolinggo	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	-	+	-	-	-	+	+	+
		PS + DS	-	-	+	-	-	+	+	+	-
14.	Kab. Pasuruan	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	+	+	+	+	-	-	+	-
		PS + DS	-	+	+	+	+	+	+	+	-
15.	Kab. Sidoarjo	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	-	-	-	-	+	+	-	-
		PS + DS	-	-	-	-	-	+	+	+	-
16.	Kab. Mojokerto	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	+	+	+	+	+	+	-	-	+
		PS + DS	-	+	+	+	-	+	+	-	+

No.	Kabupaten/Kota	Indikator	S e k t o r								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Kab. Jombang	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	+	+	-	-	+	-	+	-
		PS + DS	-	+	+	-	-	+	-	+	-
18.	Kab. Nganjuk	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	+	-	+	+	-	-	-	-	+
		PS + DS	-	-	+	+	-	-	-	+	+
19.	Kab. Madiun	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	+	-	+	+	-	+	+	-	-
		PS + DS	-	-	-	+	-	+	+	-	-
20.	Kab. Magetan	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	-	+	-	+	-	-	+	-
		PS + DS	-	-	-	+	-	+	+	+	-
21.	Kab. Ngawi	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	-	+	+	+	-	-	+	-
		PS + DS	-	+	-	+	-	+	-	+	-
22.	Kab. Bojonegoro	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	+	+	+	+	-	-	+	-
		PS + DS	-	+	+	+	+	+	+	+	-
23.	Kab. Tuban	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	+	+	+	+	-	+	-	+	-
		PS + DS	-	+	+	+	-	+	+	+	-
24.	Kab. Lamongan	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	+	+	+	-	+	-	+	+	-
		PS + DS	+	+	+	-	+	+	+	+	-
25.	Kab. Gresik	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	+	+	-	-	-	+	-	+
		PS + DS	-	+	+	-	-	+	+	+	+
26.	Kab. Bangkalan	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	+	+	+	+	-	-	-	-
		PS + DS	-	+	-	+	+	+	-	+	-
27.	Kab. Sampang	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	+	+	-	-	+	-	+	-
		PS + DS	-	+	-	-	-	+	+	+	-
28.	Kab. Pamekasan	NS	+	+	+	+	-	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	+	+	+	+	+	+	-	+
		PS + DS	-	+	+	+	+	+	+	+	-
29.	Kab. Sumenep	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	-	-	-	-	+	-	-	+
		PS + DS	-	-	-	-	-	+	-	+	-
30.	Kota Kediri	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	-	-	+	+	-	+	+	+
		PS + DS	-	-	-	+	+	-	+	+	+
31.	Kota Blitar	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	+	-	+	-	+	+	-	+	+
		PS + DS	-	-	+	-	+	+	+	+	+
32.	Kota Malang	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	-	+	+	+	-	-	+	+
		PS + DS	-	-	-	+	+	+	-	+	+

Shift Share Analysis (SSA) (Lanjutan)

No.	Kabupaten/Kota	Indikator	Sektor								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Kota Probolinggo	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	+	-	-	-	+	+	-	+	+
		PS + DS	-	-	-	-	+	+	-	+	+
34.	Kota Pasuruan	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	-	+	-	+	-	-	+	-
		PS + DS	-	-	-	+	+	-	+	+	+
35.	Kota Mojokerto	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	+	-	-	-	-	-	-	+	+
		PS + DS	+	-	-	-	-	-	-	+	+

No.	Kabupaten/Kota	Indikator	Sektor								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	Kota Madiun	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	+	-	+	+	+	+	+
		DS	+	-	+	-	-	+	+	+	+
		PS + DS	+	-	-	+	-	+	+	+	+
37.	Kota Surabaya	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	-	-	-	+	+	+	+	+	+
		PS + DS	-	-	-	+	-	+	+	+	+
38.	Kota Batu	NS	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		PS	-	+	-	+	-	+	+	+	+
		DS	+	+	-	+	+	-	+	+	+
		PS + DS	-	+	-	+	+	+	+	+	+

Pembahasan

Tabel 4

No.	Kabupaten / Kota	Sektor Ekonomi								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	Kab. Pacitan	CMCT	CMTT	BC	BC	CMTT	BC	BC	CMTT	CMCT
02.	Kab. Ponorogo	CMTT	CMCT	BC	RT	CMCT	BC	BC	CMTT	CMTT
03.	Kab. Trenggalek	CMTT	CMCT	RT	BC	RT	BC	RT	RT	CMTT
04.	Kab. Tulungagung	CMTT	CMTT	BC	BC	BC	CMTT	BC	CMCT	CMTT
05.	Kab. Blitar	CMTT	CMTT	RT	BC	RT	RT	RT	CMTT	CMTT
06.	Kab. Kediri	CMTT	CMCT	BC	BC	RT	BC	RT	RT	CMCT
07.	Kab. Malang	CMTT	CMCT	BC	RT	BC	BC	RT	BC	CMCT
08.	Kab. Lumajang	CMTT	CMTT	RT	RT	CMTT	BC	RT	CMTT	CMCT
09.	Kab. Jember	CMTT	CMTT	BC	BC	RT	BC	BC	CMCT	CMCT
10.	Kab. Banyuwangi	CMCT	CMTT	RT	BC	RT	BC	RT	CMTT	RT
11.	Kab. Bondowoso	CMTT	BC	BC	BC	RT	BC	BC	CMTT	CMTT
12.	Kab. Situbondo	CMCT	CMCT	RT	BC	RT	CMCT	RT	RT	RT
13.	Kab. Probolinggo	CMTT	CMTT	BC	RT	CMTT	BC	BC	BC	CMTT
14.	Kab. Pasuruan	CMTT	BC	CMCT	CMCT	BC	BC	BC	BC	CMTT
15.	Kab. Sidoarjo	RT	RT	CMTT	BC	RT	BC	CMCT	BC	BC
16.	Kab. Mojokerto	CMTT	BC	CMTT	BC	RT	BC	BC	RT	RT
17.	Kab. Jombang	CMTT	CMCT	RT	RT	RT	CMCT	RT	RT	CMTT
18.	Kab. Nganjuk	CMTT	RT	BC	BC	RT	CMCT	BC	BC	CMCT
19.	Kab. Madiun	CMTT	CMTT	BC	BC	CMTT	CMCT	BC	RT	CMTT
20.	Kab. Magetan	CMTT	RT	RT	BC	CMTT	BC	RT	RT	CMCT
21.	Kab. Ngawi	CMTT	RT	RT	BC	CMTT	CMCT	BC	CMTT	CMCT
22.	Kab. Bojonegoro	CMTT	CMCT	RT	BC	RT	BC	RT	CMTT	CMCT
23.	Kab. Tuban	CMTT	CMTT	BC	CMCT	CMCT	BC	BC	BC	RT
24.	Kab. Lamongan	CMTT	BC	RT	RT	RT	BC	BC	BC	CMTT
25.	Kab. Gresik	RT	CMCT	CMCT	CMTT	RT	BC	BC	BC	BC
26.	Kab. Bangkalan	CMTT	BC	BC	BC	CMCT	RT	CMCT	BC	CMCT
27.	Kab. Sampang	CMTT	CMCT	RT	BC	RT	BC	BC	BC	CMTT
28.	Kab. Pamekasan	CMTT	BC	BC	BC	CMCT	BC	BC	CMCT	CMCT
29.	Kab. Sumenep	CMCT	CMTT	RT	RT	BC	BC	RT	BC	CMCT
30.	Kota Kediri	RT	RT	CMCT	RT	BC	RT	BC	BC	BC
31.	Kota Blitar	RT	RT	BC	CMCT	CMCT	BC	CMTT	CMCT	CMTT
32.	Kota Malang	RT	RT	CMTT	BC	BC	CMCT	RT	CMCT	CMCT
33.	Kota Probolinggo	RT	RT	RT	CMTT	BC	CMCT	CMTT	CMCT	CMCT
34.	Kota Pasuruan	RT	RT	RT	CMCT	CMCT	CMTT	CMCT	CMCT	CMCT
35.	Kota Mojokerto	BC	RT	RT	CMCT	CMTT	CMTT	CMCT	CMCT	CMCT
36.	Kota Madiun	RT	RT	RT	CMCT	CMTT	CMCT	CMCT	CMCT	CMTT
37.	Kota Surabaya	RT	RT	CMTT	CMCT	CMTT	CMCT	CMCT	CMCT	BC
38.	Kota Batu	CMTT	BC	RT	BC	BC	CMTT	BC	BC	CMCT

Sektor bertipologi “Cepat Maju Cepat Tumbuh/CMCT” mencerminkan bahwa sektor tersebut selain

memberikan kontribusi yang tinggi, juga mengalami pertumbuhan tinggi, meliputi Kota Pasuruan, Kota

Mojokerto, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Daerah yang tidak mempunyai sektor yang memenuhi kriteria CMCT : Kab. Blitar, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kab. Mojokerto, dan Kab. Lamongan. Sektor yang bertipologi “Cepat Maju Tapi Tertekan/CMTT” bisa diinterpretasikan bahwa sektor tersebut hanya memberikan kontribusi yang tinggi, namun tingkat pertumbuhannya sudah mulai menurun. Dengan kata lain sektor ini sudah mulai mengalami tingkat pertumbuhan jenuh, meliputi Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Lumajang, Kab. Probolinggo, dan Kab. Madiun. Sedangkan daerah yang tidak mempunyai sektor yang memenuhi kriteria ini adalah Kab. Situbondo dan Kab. Kediri. Sektor yang bertipologi “Berkembang Cepat/BC” bisa diartikan bahwasanya sektor tersebut memberikan kontribusi yang rendah, namun pertumbuhannya cepat, dan sektor yang mempunyai tipologi seperti ini biasanya menjadi sektor andalan di masa yang akan datang, meliputi Kab. Bondowoso, Kab. Pasuruan, Kab. Pamekasan, dan Kota Batu. Sedangkan daerah yang tidak mempunyai sektor yang memenuhi kriteria ini adalah Kab. Jombang dan Kota Madiun. Sektor bertipologi “Relatif Tertinggal/RT” merupakan sektor yang secara kontribusi maupun pertumbuhannya sama-sama rendah, sehingga memerlukan penanganan dan kebijakan khusus untuk meningkatkan kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi daerah. Daerah yang paling banyak memiliki sektor relatif tertinggal adalah Kab. Situbondo, Kab. Jombang, kemudian disusul Kab. Trenggalek, Kab. Blitar, Kab. Banyuwangi, Kab. Magetan, dan Kab. Kediri. Sedangkan daerah yang tidak mempunyai sektor yang memenuhi kriteria RT adalah Kab. Pacitan, Kab. Tulungagung, Kab. Pasuruan, dan Kab. Pamekasan

Hasil perhitungan *shift-share* per sektor untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat diamati dalam tabel di atas. Nilai PS + DS yang positif artinya

pertumbuhan ekonomi sektor-sektor tersebut di kabupaten/kota lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor tersebut di tingkat Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan nilai PS + DS kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai nilai positif untuk sektor pertanian hanya 4 kabupaten/kota, yang meliputi Kab. Trenggalek, Kab. Lamongan, Kota Madiun, dan Kota Mojokerto. Pada sektor industri pengolahan, terdapat 16 kabupaten/kota yang memiliki nilai PS + DS positif, antara lain Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Pamekasan, dan Kota Blitar. Sedangkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran lebih dari 90% kabupaten/kota memiliki nilai PS + DS yang positif, atau hanya terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki nilai PS + DS negatif, antara lain Kab. Situbondo, Kab. Kediri, dan Kab. Pasuruan. Secara *proportional shift*, nilai PS sebagian bernilai positif dan sebagian negatif. Nilai PS untuk sektor pertanian dan sektor industri pengolahan di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur bernilai negatif. Sedangkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur bernilai positif. Nilai PS yang positif juga terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta pada sektor jasa-jasa. Nilai PS positif mengandung makna bahwa di setiap kabupaten/kota memiliki potensi dalam sektor-sektor tersebut yang secara regional tumbuh dengan cepat. Hasil penghitungan *shift share* ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El-Hadj bahwasanya di negara berkembang terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor tersier, yaitu dari sektor pertanian ke sektor jasa.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mempunyai sektor tertentu yang menjadi basis bagi perekonomian daerah. Melalui pendekatan LQ terlihat jelas bahwasanya sektor jasa merupakan sektor basis di hampir seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, dimana terdapat 30 kabupaten/kota yang memiliki nilai $LQ > 1$ selama periode penelitian. Berikutnya adalah sektor pertanian, dimana terdapat 28 kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Timur yang memiliki nilai $LQ > 1$ selama periode penelitian.

2. Pertumbuhan sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor bangunan di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB Jawa Timur secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan nilai RPR yang negatif ($RPR < 1$). Sebaliknya, pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih; dan semua sektor tersier yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel, dan

restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa cenderung mengalami pertumbuhan yang positif jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB Jawa Timur ($RPR > 1$).

3. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi, dimana terdapat 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang pertumbuhan pada sektor ini lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang dibuktikan dengan nilai RPS yang positif ($RPS > 1$). Kondisi ini berbanding terbalik pada sektor pertanian, dimana pertumbuhan sektor pertanian di 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami perlambatan, yang ditunjukkan dengan nilai RPS negatif ($RPS < 1$)
4. Berdasarkan hasil analisis potensi ekonomi, maka Kota Pasuruan merupakan daerah yang paling banyak memiliki sektor ekonomi potensial dengan tipologi "CMCT". Kota Pasuruan memiliki 5 (lima) sektor dengan tipologi CMCT, antara lain : 1). sektor listrik, gas, dan air bersih; 2). sektor bangunan; 3). sektor pengangkutan dan komunikasi; 4). sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan 5). sektor jasa-jasa. Sedangkan Kab. Situbondo merupakan daerah yang paling banyak memiliki sektor ekonomi dengan tipologi "RT", antara lain : 1). sektor industri pengolahan; 2). sektor bangunan; 3). sektor pengangkutan dan komunikasi; 4). sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan 5). sektor jasa-jasa. Berikutnya adalah Kab. Jombang dengan 5 (lima) sektor ekonomi yang bertipologi "RT", antara lain : 1). sektor industri

pengolahan; 2). sektor listrik, gas, dan air bersih; 3). sektor bangunan; 4). sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan 5). sektor jasa-jasa.

5. Hasil penghitungan shift share Provinsi Jawa Timur tahun 2000-2010 sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El-Hadj bahwasanya di negara-negara berkembang terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor tersier, yaitu dari sektor pertanian ke sektor jasa.

Saran

1. Daerah yang termasuk dalam klasifikasi daerah BC karena memiliki tingkat pertumbuhan PDRB rata-rata di atas Provinsi Jawa Timur, sebaiknya lebih memprioritaskan program perencanaan daerah pada peningkatan pendapatan perkapitanya. Demikian pula bagi daerah-daerah yang termasuk dalam daerah CMTT agar lebih memprioritaskan program perencanaan daerahnya pada pertumbuhan PDRB.
2. Dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral bagi perekonomian daerah, hendaknya lebih memprioritaskan sektor-sektor yang menjadi basis yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota, sehingga optimalisasi pengembangan sektor basis akan membawa dampak positif bagi sektor-sektor non basis. Meskipun demikian sektor-sektor yang lainnya tetap mendapat perhatian secara proporsional sesuai dengan potensi dan peluang pengembangannya, serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.



DAFTAR PUSTAKA

- Abipraja, Soedjono, 1993, *Ekonomi Pembangunan Pengantar dan Kebijakan*, Airlangga University Press
- Adisasmita, Rahardjo, 2008, *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*, Graha Ilmu, Jakarta
- Anwar, M. Arsjad, 1995, *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek : Sumber Daya, Teknologi Dan Pembangunan*, ISBN 9796052164, Universitas Indonesia, Jakarta
- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta : BPFE
- Bah, El-hadj, 2007, *Structural Transformation in Developed and Developing Countries*, W.P. Carey School of Business, Arizona State University
- _____, 2007, *Three-Sector Model of Structural Transformation and Economic Development*, The University of Auckland, New Zeland.
- _____, 2011, *Strucutral Transformation Paths Across Country*, University of Auckland, New Zeland

- Blakely, Edward J, 1989, *Planning Local Economic Development : Theory and Practice*, Newbury Park, CA : Sage
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta
- Budiharsono, Sugeng, 1996, *Transformasi Struktural Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah Di Indonesia 1969-1987*, Disertasi, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Chenery, H.B., dan Syrquin, M., 1975, *Pattern of Development 1950 – 1970*, Oxford University Press, London
- Dasril, Anna Siti Nurdjanah, 1993, *Pertumbuhan Dan Perubahan Struktur Produksi Sektor Pertanian Dalam Industrialisasi Di Indonesia 1971-1990*, Disertasi, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta, Penerbit : PT. Pustaka LP3ES Indonesia
- Haynes, Kingsley and Dinc Mustafa, 1997, *Productivity in Manufacturing Regions : A Multifactor/Shift Share Approach, Growth and Change*, Volume 28, 201-221. www.google.com
- Hidayat, Amir, Suahasil Nazara, 2005, *Analisis Perubahan Struktur Ekonomi (Economic Landscape) Dan Kebijakan Strategi Pembangunan Jawa Timur Tahun 1994 Dan 2000 : Analisis Input-Output*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia Edisi Januari 2005
- Jhingan, M.L, 2003, *Ekonomika Pembangunan dan Perencanaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2000, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta UPP AMPYKPN
- _____, 2004, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Miller, Mark M., dan Gibson, Lay James, *Location Quotient : A Basic Tool for Economic Development Analysis*
- Sarwedi, 2010, *Analisis Determinan Perubahan Penawaran Barang Ekspor Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol. 12 No. 3, Bank Indonesia, Jakarta
- Srinivasan, T.N., Chenery, Hollis, eds. 1988. *The Handbook of Development Economics, vol. I*. Amsterdam: North-Holland Press.
- Sudarti, 2009, *Penentuan Leading Sektor Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*, Humanity Volume V No 1 68-79, Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Malang
- Sufri, Mukhlis, 2003, *Analisis Daya Saing Komoditas Ekspor Non Migas Dan Perubahan Struktur Ekonomi Implikasinya Terhadap Kebijaksanaan Pembangunan Di Sulawesi Selatan*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya
- Suparta, I Wayan, 2009, *Spillover Effect Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Dan Sumatera Selatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10 No. 1 32-48, Universitas Lampung
- Syrquin, M, 1988, *Patterns of Structural Change*, Handbook of Development Economics, Elsevier Science Publishers B.V
- Tambunan, Tulus T.H, 2001, *Transformasi Ekonomi Di Indonesia*, Jakarta : Penerbit : Salemba
- _____, 2003, *Perekonomian Indonesia : Beberapa Masalah Penting*, Jakarta : Penerbit : Ghalia Indonesia
- Tarigan, Robinson. 2003. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi (edisi revisi)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro, Michael P and Stephen Smith, 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Terjemahan, Jakarta : PT Erlangga
- Yusuf, Maulana, 1999, *Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Analisis Alternatif Dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Volume XI, VII No 2 219-233